

Perang Bush, Perang Keadilan?

Oleh Victor Silaen

Ketika perang usai, seorang tentara pun pulang. Tetapi, ia tidak punya makanan. Lalu, ia melihat orang yang memilikinya. Ia membunuh orang itu. "Kamu tidak boleh membunuh orang", kata sang hakim. "Mengapa tidak", Tanya si tentara. (Wolfgang Borchert, tentang kompleksitas masalah yang menyangkut kekerasan)

Pengantar

Wacana tentang invasi pasukan militer Amerika Serikat (AS), yang dibantu pasukan militer Inggris, ke Irak sudah berlalu. Kini, berita-berita soal perang besar yang dikobarkan oleh Presiden AS George Walker Bush itu sudah lain substansinya. Persoalan sekarang adalah bagaimana memulihkan situasi-kondisi di Irak pasca-perang. Bagaimana masa depan Negeri 1001 Malam itu di bawah pemerintahan sementara AS, yang dipimpin Jay Garner, itulah pertanyaan besarnya. Dalam arti, apakah Irak akan berkembang menjadi sebuah negara demokratis baru di wilayah Timur Tengah? Jawabannya tentu tak bisa dipastikan sekarang. Memang, sejarah mencatat tentang negara-negara yang demokratis. Misalnya saja di Filipina, yang setelah dikoloni AS kelak berkembang menjadi negara demokratis dan menjadi sekutu negara adidaya itu. Demikian halnya dengan Jepang, yang setelah digempur AS justru berkembang menjadi negara demokratis baru dan makmur pula. Tapi, Irak berbeda dengan kedua negara itu. Sebab, sebagai bangsa, ia terdiri atas berbagai suku (juga sekte keagamaannya) yang membuatnya menjadi sangat heterogen. Sedangkan Filipina dan Jepang relatif homogen. Didasarkan itulah, upaya merekonstruksi Irak pascaperang agaknya memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi.

Tulisan ini tak bermaksud menyoroti hal-hal yang masih *predictable* di Irak itu. Sebaliknya, tulisan ini bertujuan kembali mewacanakan perang¹, sebagai sebuah persoalan yang banyak menimbulkan debat pro dan kontra. Apakah dewasa ini berperang merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan masih dapat dibenarkan? Itulah pertanyaan utamanya. Tak mudah, memang, untuk menjawabnya. Apalagi dikaitkan dengan perang AS-sekutu versus Irak itu, yang secara faktual telah menimbulkan dua kubu: ada yang kontra, tapi tak sedikit pula yang pro Bush. Kedua kelompok itu tentu memiliki alasannya masing-masing. Itu sebabnya kita perlu menimbanginya secara komprehensif. Bagian berikut tulisan ini mencoba menganalisa perang dari berbagai perspektif.

Perang Ilegal dan Kekerasan Agresif

Pertama, perang yang dimotori Bush sesungguhnya adalah perang yang tak pernah direstui oleh pihak manapun. Dalam konteks ini, tentu saja sikap PB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) harus menjadi acuan utama kita. Sebab, lembaga yang berkantor pusat di New York, AS, ini didirikan justru untuk mewujudkan perdamaian bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Itu berarti, jika ada bangsa-bangsa (atau

¹ Perang yang dimaksud dalam konteks ini adalah perang yang bersifat fisik, yang tentu saja mengandung kekerasan sebagai hakikatnya.

negara-negara) yang bertikai, dengan sendirinya PBB harus berperan aktif menjadi wasitnya. Dalam konteks itu, lembaga internasional ini dimungkinkan untuk bersikap setuju terhadap perang atau sebaliknya. Dan apapun sikapnya, tentulah sudah dipertimbangkan matang-matang, khususnya oleh negara-negara yang termasuk sebagai anggota Dewan Keamanan di PBB.

Sekaitan dengan perang AS-sekutu versus Irak, sikap PBB sesungguhnya sangat tegas: tidak setuju. Artinya, PBB jelas tidak mendukung AS untuk memerangi Irak. Itu berarti, jika Bush tetap bersikukuh untuk menginvasi Irak, dapat dikatakan bahwa perang yang dikobarkannya adalah perang yang ilegal.² Kalau begitu, dalam konteks ini, bagaimana kita harus menyikapinya? Ada hal yang teramat penting untuk kita perhatikan dengan seksama untuk dapat menjawabnya dengan tepat. Yakni, eksistensi PBB sebagai lembaga perdamaian bangsa-bangsa di dunia itu kita akui atau tidak? Kalau jawabannya “ya” dan diikuti dengan sikap yang konsisten, maka dengan sendirinya kita pun harus mengatakan AS (atau, lebih tepat Bush dan pemerintahnya) sebagai pihak yang salah karena sudah melakukan pelanggaran dengan tidak mengindahkan sikap PBB.

Dengan mengatakan demikian, itu berarti kita mengedepankan sikap hormat terhadap sebuah lembaga resmi dunia dan kebijakan-kebijakan politik-hukum yang dirumuskannya sebagai ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh setiap negara anggotanya. Bukankah di dalam negara sendiri pun kita dituntut untuk taat terhadap pelbagai undang-undang dan peraturan yang sah? Kalau tak setuju, itu hak masing-masing orang. Tapi, bukan berarti kita dapat melanggarnya begitu saja. Artinya, kalau tak puas dengan undang-undang atau peraturan itu, maka kita harus berjuang untuk mengubahnya. Itu berarti perlu waktu. Kita harus bersabar menunggunya, hingga perjuangan itu berhasil. Dengan demikian, ketertiban senantiasa dapat dijaga.³

Mungkin timbul pertanyaan: bagaimana jika situasinya sudah sangat kritis dan mendesak? Tak bolehkah suatu undang-undang atau peraturan dilanggar padahal situasinya sudah sangat genting? Jawabannya tentu sangat relatif. Dalam arti, siapa yang berhak menilai bahwa alasan untuk melakukan pelanggaran itu memang dapat diterima? Juga, berapa banyak orang yang mendukung penilaian itu? Dalam konteks perang AS-sekutu versus Irak, alasan apa yang dapat membenarkannya, sehingga tindakan Bush-Blair yang melanggar ketentuan PBB itu pun dapat kita terima sebagai sesuatu yang niscaya?

Agaknya tidak ada. Apalagi, alasan Bush dalam memerangi Irak telah beberapa kali diubahnya sendiri. Pertama, karena ia beranggapan bahwa Irak masih menyimpan sejumlah senjata pemusnah massal. Tapi, ketika utusan khusus PBB ke Irak yang menyelidiki kebenaran anggapan itu melaporkan tidak ada (atau, setidaknya belum ditemukan), Bush segera mencari motif lain untuk memerangi Irak: membebaskan negara ini dari pemerintahan Saddam Hussin yang otoriter lagi tiranik. Dan itulah yang kemudian kerap disebut-sebut sebagai “*just war*”: perang untuk keadilan. Tapi, mengapa harus dengan mengobarkan perang? Sudah kehilangan akalkah Bush? Apalagi Irak merupakan negara kecil, sehingga sangat tak seimbang jika ia harus berhadapan dengan kekuatan militer AS yang terkenal sebagai angkatan perang nomor satu di dunia.

² Istilah ini saya adaptasi dari Douglas dan Waksler, “Kekerasan”, hal. 10-11, dalam Teori-teori Kekerasan, Thomas Santoso (ed.), Jakarta : Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002. Dalam tulisan keduanya itu, kekerasan dibedakan antara yang legal (yang ditolerir, bahkan disetujui) dan illegal (yang secara resmi mendapat stigma).

³ Lihat penjelasan lengkap mengenai hal ini dalam T. Mulya Lubis, Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983.

Tak heran, kalau di luar PBB pun, berbagai pihak dan kalangan di seluruh dunia mengecam tindakan agresif Bush dan sekutunya itu. Perdana Menteri Inggris Tony Blair pun, oleh sebgayaan rakyat di dalam negerinya, dituding sebagai “anjing peliharaan Bush yang jinak” lantaran sikapnya yang sangat loyal kepada Bush. Mungkin, kalau Blair mau jujur, ia sendiri sebenarnya tak setuju perang. Tapi, apa boleh buat, kepentingan jangka panjang di balik relasi AS-Inggris agaknya lebih mendasari pertimbangan Blair. Alhasil, pasukan militer Inggris pun berkoalisi dengan pasukan militer AS demi “mengeroyok” Irak.

Akan halnya warga negara AS sendiri, jauh sebelum perang AS-sekutu versus Irak berlangsung, begitu gencarnya menentang rencana Bush, sampai-sampai mereka bersedia turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran. Tapi, herannya, setelah perang itu usai, dan Bush sendiri dinilai sukses dalam memerangi Irak, mayoritas rakyat AS justru menunjukkan sikap persetujuannya atas cara yang ditempuh Bush dalam menangani masalah-masalah di luar negeri. Dua media raksasa AS, harian Washington Post dan stasiun televisi ABC, misalnya, beberapa waktu lalu melaporkan hasil jajak pendapat yang dilakukan sekaitan hal itu. Disebutkan, 56 persen dari 1.024 responden mendukung Bush untuk menyerang Iran setelah berhasil mengobrak-abrik Irak.⁴ Tapi, hal itu sesungguhnya tak terlalu mengherankan benar jika kita memahami nilai-nilai budaya AS yang dua di antaranya adalah patriotisme dan pragmatisme.⁵

Kembali pada alasan untuk memusnahkan senjata pemusnah massal yang diduga kuat masih disimpan di Irak, sesungguhnya sikap Bush dapat dikatakan ambigu dalam hal ini. Sebab, terhadap Korea Utara, yang dituduhnya sebagai negara yang memiliki persenjataan pemusnah massal, Bush tak pernah mengancam akan memeranginya. Ia justru menempuh jalan diplomasi untuk “menjinakkan” negara di kawasan Asia Tenggara yang masih anti-demokrasi itu.⁶ Bukankah hal itu menunjukkan sikap Bush yang tak konsisten sama sekali?

Kedua, perang ini sekaligus merupakan kekerasan agresif, yang dilakukan bukan untuk membela atau melindungi diri, melainkan untuk mendapatkan “sesuatu”. Dalam paradigma perang modern, kekerasan agresif jelas tak dapat dibenarkan.⁷ Karena, tindakan tersebut dilakukan bukan untuk mempertahankan keselamatan diri sendiri, melainkan untuk menyerang pihak lain.⁸ Pertanyaannya, dalam konteks perang Bush, apakah “sesuatu” yang dimaksud itu?

Ada banyak kemungkinan yang bisa diajukan sebagai jawabannya. Pertama, “sesuatu” itu adalah digantikannya Saddam Hussin oleh orang lain yang sesuai – atau paling tidak mendekati – kriteria AS. Alasannya, Hussein itu pemimpin yang otoriter dan kejam, (terbukti ia tega membunuh rakyatnya sendiri – utamanya kelompok oposisi dari etnik Kurdi, bahkan menantu dan cucunya, hanya demi melanggengkan kekuasaannya). Tapi, kita layak mempertanyakan hal ini. Sebab, jikapun benar demikian, mengapa Bush sedemikian intervensionisnya terhadap persoalan internal negara lain? Jawabannya, begitulah watak para pemimpin AS, sejak dulu. Boleh jadi, karena bangsa ini –sejak dulu pula – merasa

⁴ Simak artikel “Misteri Tragedi 9/11” dalam Kompas, 1 Juli 2003.

⁵ Lihat Luther S. Luedtke, “The Search for American Character”, dalam Making America: Culture and Society of The United States, Luther S. Luedtke (ed.), Washington DC: United States Information Agency, 1987.

⁶ AS, di bawah kepemimpinan George W. Bush, mengelompokkan Irak dan Korea Utara sebagai “axis of evil” karena menuduh keduanya menyimpan senjata pemusnah massal atau nuklir yang sangat berbahaya.

⁷ Lihat uraian John Stott dalam isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani, Jakarta: Yayasan Bina Kasih/OMF, t.t., hal. 112-120.

⁸ Penjelasan tentang jenis-jenis kekerasan dapat dilihat dalam Douglas dan Waksler, “Kekerasan”, op cit., hal 9-42.

mengemban amanat ilahi untuk menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Maka, tak hirau dianggap usil, jika ada bangsa lain yang dipandang masih hidup di dalam kegelapan dan karenanya perlu diterangi, AS tak akan segan-segan melakukan upaya-upaya intervensionis terhadapnya.⁹

Kedua, “sesuatu” itu adalah kepentingan ekonomi dan politik. Diduga, serangan AS ke Irak dilatarbelakangi oleh minyak dan kekuasaan: untuk memperluas kekuatan ekonomi dan militer AS di dunia. Sementara tujuan ini lebih banyak menguntungkan perusahaan minyak dan orang-orang kaya serta punya kuasa, pemerintahan Bush berusaha menyebarkan ketakutan untuk mendapat dukungan publik. Misalnya, dengan mengait-ngaitkan Irak sebagai ancaman terorisme internasional yang berbahaya dan menggembar-gemborkan retorika *axis of evil* (poros kejahatan).

Jadi, kalau motivasi *oil and empire* itu benar, maka invasi AS ke Baghdad (ibukota Irak) bukan hanya untuk menjamin kelangsungan akses Washington terhadap minyak Irak. Lebih dari itu, AS ingin mengendalikan industri dan harga minyak dunia. Jika Washington bisa mengontrol minyak Irak, maka AS bisa membendung kekuatan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk menentukan harga minyak di pasar internasional. Ini akan memperkuat lobi minyak AS dan sekaligus menyediakan minyak murah bagi rakyat negara adidaya itu.

Tapi, bukan cuma itu. Terkabar, ketika perang tengah berlangsung, sejumlah perusahaan konstruksi AS tengah bersaing untuk mendapatkan tender menggiurkan dari pemerintah untuk merekonstruksi Irak pascaperang. Jadi, di saat perang masih berkecamuk, mereka sudah sibuk memikirkan proyek. Badan AS untuk Pembangunan Internasional (USAID), misalnya, telah meminta Bechtel Group Inc., Fluor Corp, Halliburton Co, Kellogg, Brown & Root, dan Parsons Corp untuk mengikuti tender senilai 900 juta dolar AS untuk proyek perbaikan dan pembangunan industri perminyakan, sistem pengairan, jalan, jembatan, sekolah, dan rumah-rumah sakit di Irak yang diperkirakan hancur lebur dibom tentara AS-sekutu.¹⁰

Terkait dengan kepentingan politik, sesungguhnya bagi AS, memerangi Irak sekaligus merupakan upaya memulihkan *superiority complex* selaku negara adidaya dan “pemimpin dunia” setelah terjadinya serangan teroris “911” (9 September) yang menghebohkan itu. Maklum saja. Sebab, sebagai balasan atas tindakan biadab jejaring terorisme global itu, Afghanistan langsung digempur sehingga rezim Taliban pun hancur. Tapi, sang musuh utama yang dicari-cari itu, Osama bin Laden, tak juga berhasil ditangkap – hidup atau mati – sampai sekarang. Bagi Bush, tragedi itu tak ubahnya aib dalam pemerintahannya. Akibatnya, ia pun merasa frustrasi, sehingga mesti ada “musuh lain” yang “layak” dijadikan sasaran amarahnya. Hal ini tak sulit dipahami bila kita mengacu pada teori frustrasi-agresi sebagaimana dikemukakan Dollard yang dikutip Gurr. Dalil dasarnya adalah “bahwa terjadinya perilaku agresif selalu mensyaratkan keberadaan frustrasi, dan sebaliknya bahwa keberadaan frustrasi selalu menimbulkan beberapa bentuk agresi”.¹¹

Bagi Bush, alasan untuk melampiaskan rasa frustrasinya itu tentu mudah dicari. Apalagi kalau bukan senjata pemusnah massal, yang katanya masih disimpan di Irak – entah di sudut-sudut mana. Pun

⁹ Richard Hofstadter, *The American Political Tradition and The Men Who made It*, New York: Random House, Inc., 1989

¹⁰ Lihat artikel T. Yulianti, “Politik Uang dalam Perang Irak”, *Harian Suara Pembaruan* edisi 4 April 2003.

¹¹ Lihat artikel Ted Robert Gurr, “Deprivasi Relatif dan Kekerasan”, dalam Thomas Santoso (ed.P, op.cit., hal. 71-72.

ketika alasan itu tak terbukti, ia tetap bisa mencari alasan lainnya. Yakni, demi mewujudkan keadilan bagi rakyat Irak. Di mata Bush, keadilan itu hanya dapat dicapai dengan terlebih dulu menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein yang otoriter dan tiranik. Ia boleh jadi benar. Tapi, sekali lagi, mengapa ia begitu intervensionisnya terhadap persoalan internal negara lain? Di atas telah dijelaskan tentang kecenderungan watak AS yang sejak dulu memang intervensionistik. Tetapi, dalam konteks perang Bush ini, mungkin juga penyebab lainnya adalah ketakutan akan merosotnya hegemoni AS di mata negara-negara di berbagai belahan dunia setelah terjadinya peristiwa “911” itu. Jika dugaan itu benar, maka kekuatan AS harus diperlihatkan dengan cara melakukan aksi kekerasan. Jika negara-negara lain percaya bahwa AS masih tetap kuat, maka AS dapat mengharapkan keuntungan di balik aksi kekerasan tersebut. Fenomena semacam ini memang kerap terjadi dalam hubungan internasional di antara negara-negara yang terlibat dalam perjuangan hegemonik dengan rivalnya.¹²

Terlepas dari semua itu, ada satu hal yang pasti: kini lagi-lagi kita menyaksikan sendiri, bahwa perang bukanlah solusi untuk menemukan damai. Sebaliknya, sebagai kekerasan, ia justru menimbulkan kompleksitas masalah lainnya (sebagaimana tergambar dalam prolog di atas). Memang, rakyat Irak bersorak-sorai kegirangan tatkala patung besar Saddam Hussein yang berdiri megah di tengah kota itu berhasil ditumbangkan. Tapi, tak lama kemudian, aksi-aksi penjarahan oleh rakyat pun terjadi di mana-mana. Situasi menjadi tak stabil, keresahan menyebar luas, lantaran pelbagai aspek dan sektor kehidupan di dalam negeri Irak tak bisa berjalan normal. Pengangguran pun meningkat drastis, karena banyak orang yang tak lagi bisa bekerja di tempat biasanya mereka mencari nafkah sehari-hari. Belum lagi jika diperhatikan pula sejumlah orang yang menjadi korban perang, baik yang tewas mengenaskan maupun yang terluka memilukan. Rakyat Irak merasa sedih dan sangat menyesalkan mengapa perang harus terjadi.

Bedanya Perang Bush dan Perang Roosevelt

Di sepanjang sejarah AS, hingga kini, dapat dikatakan ada dua perang besar yang menjadi perhatian dunia. Pertama, sebagaimana sudah dibahas, adalah perang Bush melawan Irak. Kedua, jauh sebelumnya, adalah perang Roosevelt melawan Jepang. Presiden ke-32 (1933-1945) ini dikenang sebagai pemimpin yang berhasil membawa rakyatnya keluar dari kesulitan besar yang waktu itu melanda dalam negeri AS. Tak heran jika ia terpilih empat kali berturut-turut sebagai presiden.

Pada 1936, periode pemilihan presiden yang kedua kalinya untuk pemimpin bernama lengkap Franklin Delano Roosevelt ini, revolusi damai dalam bidang ekonomi dan sosial yang telah dilancarkan Roosevelt terbukti berhasil membawa perbaikan dan pembangunan kembali negeri AS. Karena itulah ia terpilih kembali menjadi presiden dengan perolehan suara yang sangat besar jumlahnya. Selanjutnya, dari 1937 sampai 1941, Roosevelt menghadapi banyak kesukaran. Ia berbeda pendapat dengan Mahkamah Agung dan perekonomian dalam negeri mengalami kemunduran. Sementara di luar negeri, tahun 1939, terjadi perang besar di Eropa akibat Jerman menyerbu Polandia. Melalui mekanisme perundang-undangan, Roosevelt berupaya menghindarkan AS dari keterlibatannya di kancah peperangan.¹³

¹² Lihat artikel Norbert Elias, “Kekerasan dan Peradaban: Monopoli Negara atas Kekerasan Fisik dan Pelanggarannya”, dalam Thomas Santoso (ed.), *op cit.*, hal. 148-150.

¹³ Lihat Richard M. Current dkk., *American History, A Survey*, New York: Alfred Knopf, Inc., 1965

Sementara itu, ia juga berusaha memperkuat negara-negara yang terancam atau diserang. Memang, perang akhirnya tak terelakkan. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbour, Hawaii, 7 Desember 1941, Roosevelt memimpin pengerahan tenaga rakyat serta sumber-sumber yang ada untuk menjalankan perang total. Tapi, sebelum AS memasuki Perang Dunia II, ia dan Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris) telah menyusun sebuah Deklarasi 8 Pasal yang terkenal dengan nama Piagam Atlantik. Program ini merupakan program perdamaian, yang antara lain menekankan nasib sendiri, jaminan akan perdamaian, serta bebas dari kemelaratan dan ketakutan. Kebebasan itu merupakan 2 di antara 4 kebebasan yang dicantumkan Presiden Roosevelt dalam amanat tahunan yang pernah disampaikannya di hadapan Kongres AS, Januari 1941 (2 kebebasan lainnya adalah kebebasan untuk beragama dan untuk berpendapat).

Karena merasa bahwa perdamaian dunia di masa depan akan tergantung pada hubungan antara AS dan Uni Sovyet, Roosevelt berpikir keras dan berupaya merencanakan terbentuknya sebuah perserikatan bangsa-bangsa (PBB), dengan harapan agar kesulitan-kesulitan internasional dapat diselesaikan. Memang, gagasan itu tak berhasil diwujudkan hingga ia sendiri meninggal dunia (1945). Tapi, ia berhasil menanamkan visinya itu di dalam diri presiden yang menggantikannya, Harry S. Truman, yang dengan gigih memperjuangkannya hingga ia sendiri menyaksikan penandatanganan Piagam PBB, pada 1945.

Dari sepak terjang Roosevelt semasa menjadi pemimpin, dapat disimpulkan bahwa tiga hal besar telah diperjuangkannya dengan segala daya upaya. Pertama, untuk rakyatnya sendiri, ia berhasil menumbuhkan harapan, dan sebaliknya menghalau ketakutan. Kedua, untuk semua orang di seluruh dunia, ia berupaya memprakarsai terbentuknya sebuah badan dunia untuk menjamin perdamaian bangsa-bangsa, dengan menekankan pentingnya hak-hak asasi manusia dalam hal bebas beragama, bebas berpendapat, bebas dari kemelaratan, dan bebas dari ketakutan. Ketiga, untuk orang yang menggantikannya (Truman), ia telah meninggalkan warisan berharga dan keteladanan.

Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa dalam konteks perang, Roosevelt dan Bush berbeda. Jika yang terdahulu mengobarkan perang karena didahului oleh lawan, maka yang terkemudian justru memulainya sebagai lawan.

Sebagai penutup, tulisan ini ingin mengatakan bahwa sesungguhnya sangatlah jelas bahwa tak ada cinta dan kebenaran di dalam tindakan kekerasan seperti perang. Maka, jikalau umat beragama di seluruh dunia turut mengecam perang yang diprakarsai Bush itu, sesungguhnya di dalam sikap sedemikian terpancar keyakinan akan cinta dan kebenaran yang selalu baik dan benar, yang karenanya akan selalu membuahkan kemenangan. Betapa damainya dunia ini jika seluruh umat beragama mengamini keyakinan seperti itu. Tapi, tunggu dulu. Sebab, bukankah justru agama-agama yang sejak dulu telah menjadi sumber inspirasi dan energi untuk melakukan peperangan? Bukankah agama-agama yang saling berbeda secara substantif dan saling ingin mengalahkan satu sama lain itu telah sering menjadi penyulut timbulnya peperangan antarumat di mana-mana, bahkan hingga sekarang?¹⁴ Dalam Kristen, misalnya, ada sebuah lagu yang cuplikan kata-katanya sebagai berikut: “Laskar Kristen maju, masuklah perang...” Lagu tersebut sampai sekarang masih kerap dinyanyikan, dan berdasarkan itu tentulah dapat dikatakan bahwa

¹⁴ Penjelasan mendalam tentang konflik bernuansa agama itu dapat dilihat dalam Bernard Lewis, *Kemelut Peradaban Kristen, Islam dan Yahudi*, Yogyakarta: Ircisod, 1995

maknanya masih tetap diamini. Jadi, bagaimana kita harus menyikapi perang, jika di satu sisi dijauhi tapi di sisi lain justru diingini?

Mungkin, soalnya adalah paradigma, yang kini harus berubah – karena zaman pun senantiasa berubah. Lagu itu tak perlu diusangkan, dan karena itulah perang harus terus menerus dikobarkan. Tetapi, perang dalam konteks ini adalah perang atas nama cinta dan kebenaran. Dan dengan dasar itulah maka kekerasan sebagai hakikat perang kini harus dilihat sebagai hal yang tak lagi relevan. Sasaran perang pun kini tak lagi manusia. Artinya, kita tak harus menafikan perang, jika perang yang dimaksud adalah upaya dengan segenap daya untuk melawan rupa-rupa kejahatan, daya untuk melawan rupa-rupa kejahatan, ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan, ketertindasan, kebobrokan moral, dan yang sejenisnya. Sebab, dengan aksi-aksi konkret itulah keadilan dan perdamaian niscaya dapat diwujudkan. Dan mungkin perang semacam itulah yang dapat dikatakan sebagai perang dalam perspektif agama – yang niscaya disetujui dan direstui.

Kepustakaan

Current, Richard M. dkk., *American History, A Survey*, New York: Alfred Knopd, Inc., 1965

Douglas Jack D. dan Frances Chaut Waksler, “Kekuasaan”, dalam *Teori-teori Kekerasan*, Thomas Santoso (ed.), Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002.

Elias, Norbert, “Kekerasan dan Peradaban: Monopoli Negara atas Kekerasan Fisik dan Pelanggarannya”, dalam *Teori-teori Kekerasan*, Thomas Santoso (ed.), Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002.

Gurr, Ted Robert Gurr, “Deprivasi Relatif dan Kekerasan”, dalam *Teori-teori Kekerasan*, Thomas Santoso (ed.), Jakarta: Ghalia dan Unviersitas Kristen Petra, 2002.

Hofstadter, Richard, *The American Political Tradition and The Men Who Made It*, New York: Random House, Inc., 1989.

Kompas, 1 Juli 2003.

Luther S. Luedtke, “The Search for American Character”, dalam *Making America: Culture and Society of The United States*, Luther S. Luedtke (ed.), Washington DC: United States Information Agency, 1987.

Lewis, Bernard, *Kemelut Peradaban Kristen*, Islam dan Yahudi, Yogyakarta: Ircisod, 1995.

Lubis T. Mulya, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, Isu dan Tindakan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1983.

Stott, John, *Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani*, Jakarta: Yayasan Bina Kasih/OMF, t.t.

Yulianti, T., “Politik Uang dalam Perang Irak”, *Harian Suara Pembaruan* edisi 4 April 2003.